

MORFOLOGI POLA MUKIMAN ADATI BALI

Oleh :

I Ketut Alit

Dosen Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Arsitektur, Universitas Udayana

Email: tualit-3346@yahoo.com

ABSTRAK

Pola mukiman adati Bali diejawantahkan dari falsafah dan konsep masyarakat yang berlandaskan agama (Hindu), dicerna sesuai kearifan lokal (local genius) masyarakat setempat. Cerminan polanya bervariasi dimana faktor geografi ikut memberikan andil dalam pembentukan wujud tipologi pola mukimannya. Tipologi pola mukiman adati yang demikian, merupakan wadah tempat bermukim yang berkelanjutan sesuai idealisme, sosial budaya, dan perilaku masyarakatnya.

Morfologi mukiman adati Bali bagaikan wajah asli yang di make-up dengan berbagai macam kosmetik melalui proses yang mengarah pada penyesuaian, sampai pada perubahan dari wujud aslinya. Proses morfologinya dapat dipengaruhi oleh perkembangan dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Isu utama adalah: telah terjadi morfologi dalam berbagai tingkatan, dan permasalahannya adalah adanya degradasi pada nilai-nilai yang bersifat fisik dan nonfisik.

Kini, morfologi menunjukkan pergerakan makin cepat dari pola mukiman adati perdesaan menuju perkotaan, yang pada bagian-bagian tertentu melenyapkan tipologi adati yang telah dimiliki. Untuk itu, diperlukan usaha terpadu dan berkelanjutan untuk memahami, mengerti, dan mendudukkan secara benar dalam kancah pertarungan antara tradisi dan modernisasi untuk dapat mengambil sikap pada setiap pengambilan keputusan secara tepat dan benar.

Kata Kunci : pola mukiman, dan morfologi.

ABSTRACT

The settlement pattern of Bali tradition is a local genius which be manifested from philosophy and concept of Hindus community. Geography factor has role in developing the diversity of the pattern settlement typology. This typology is a place to ongoing settle in accordance with the idealism, social culture and society behavior.

The Settlement morphology of Bali tradition is evidently a process of change, from the process leading to an adaptation till the process that totally changes from its original form. The process morphology is essentially influenced by both internal and external factors. The main issues are happening at a various level of morphology and its problem is a degradation of physic and non physic values.

Nowadays, the morphology shows obviously the rapid movement from the rural tradition settlement pattern towards an urban area. Thus, it seems that we strongly require the integrated and sustainable effort to precisely understanding the issue between tradition and modernization in order to take the right and proper decision.

Key Word: settlement pattern and morphology.

PENDAHULUAN

Pola mukiman adati Bali memiliki tipologi yang berangkat dari tatanan tradisi yang berdasarkan adat dan kepercayaan (Hindu). Secara tradisi terdapat wujud tipologi dari tingkat regional Bali sampai pada unit-unit hunian sebagai tempat bermukim. Bentuk tipologi yang paling utama ditentukan oleh adanya konotasi yang bersifat dualistik antara profan dan sakral yang diterjemahkan dalam wujud fisik dengan adanya area hulu (*luan*) dan hilir (*teben*).

Tipologi pola mukiman adati Bali dikenal sebagai mukiman yang mewadahi suatu masyarakat yang cukup ketat berpegang dan mengamalkan unsur-unsur sistem budayanya, terutama unsur kepercayaan atau religi dengan segala nilai, kaidah, norma dan aturan-aturannya. Unsur kepercayaan ini merasuk pula ke dalam pola mukimannya sebagai salah satu unsur lingkungan budayanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bermacam-macam pandangan yang terakumulasi dalam suatu konsep yang dapat dijabarkan dalam berbagai norma dan aturan terhadap pola dan orientasi mukiman sesuai dengan idealisme masyarakatnya.

Dalam usaha menciptakan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam lingkungannya terlihat jelas bahwa tipologi pola mukimannya, berpedoman pada konsep *Tri Hita Karana* yang dilandasi oleh sistem kepercayaan dan agama (Hindu). Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa *Tri Hita Karana* merupakan landasan kehidupan masyarakat Bali, yang terdiri dari filosofi (*tatwa*) yang tercermin dalam pikiran manusia, etika yang terlihat dalam tindakan, dan upacara yang terwujud dalam upacara (Puja 1982:32).

Disisi lain, dapat pula dilihat keterkaitan pola mukiman dengan konsep "*Rwa Bhineda*" yang ada dalam agama Hindu, yaitu dua hal yang bertentangan seperti; sakral-profana, hulu-hilir, utara-selatan, positif-negatif, baik-buruk dan sebagainya yang pada kenyataannya memiliki nilai harmonis bila didudukkan secara benar. Konsep ini diterapkan dengan sangat teliti

dalam pola mukiman yang tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan dalam bermukim dan berbhuana.

Telah kita ketahui bahwa kini bentuk pola mukiman adati telah mengalami morfologi akibat berbagai tanggapan aktif masyarakatnya. Pergeseran dan perubahan muncul dari perkembangan pola pikir dan adanya inovasi baru, sehingga mengalami perkembangan dalam berbagai bidang baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Perkembangan itu ada yang berlangsung sangat lambat dan berjenjang, dan ada pula yang berubah secara dinamis dan sangat cepat. Perubahan itu dapat terjadi dalam aspek fisik maupun nonfisik, dan menurut Koentjaraningrat (1985:180), perubahan pada sistem budaya akan mempengaruhi sistem sosial dan benda budayanya.

Berbagai hal yang mendorong terjadinya morfologi pola mukiman umumnya adalah perubahan kebudayaan (*cultural change*), faktor dari dalam (*internal factor*) seperti adanya inovasi, penambahan penduduk, dan faktor luar (*external factor*) karena pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan akulturasi atau asimilasi. Ulasan di atas merupakan cuplikan hubungan sistem budaya Bali umumnya atau sistem kepercayaan khususnya dengan morfologi pola mukiman adati Bali.

Isu utama adalah telah terjadi morfologi dalam berbagai tingkatan. Menurut (Bagus 1980: 297-298), akhir-akhir ini proses perubahan kebudayaan Bali telah mempengaruhi sendi-sendi kebudayaannya, sampai mengancam perubahan nilai budaya yang mereka junjung tinggi.

Permasalahan saat ini adalah perwujudan pola mukiman dipengaruhi oleh tanggapan aktif masyarakat terhadap lingkungannya. Tanggapan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya dan kebijakan, dimana hal ini mungkin akan menimbulkan sistem budaya yang tersirat, dan kemungkinan berangsur-angsur akan mengalami pergeseran maupun perubahan. Taraf hidup yang makin meningkat, sistem sosial dan ekonomi makin berkembang, kemampuan dalam pembangunan yang meningkat, dan berbagai

kebutuhan baru yang harus diterima. Hal-hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pola mukimannya. Perubahan itu dapat terjadi pada pola mukiman tingkat regional, desa sampai pada pola unit-unit hunian terkecil.

Kini, nampaknya pola-pola mukiman adati Bali yang semakin bergairah mencari dan mempertahankan identitas yang ditunjang oleh kepercayaan, sistem pengetahuan, nilai-nilai, dan norma-norma budaya. Disisi lain, tampak pula pola mukiman adati yang bergerak menuju perkotaan makin mengalami degradasi terutama dipicu oleh pembangunan fasilitas umum yang bersifat dinas dan adat.

Adanya gelombang pengaruh luar yang amat besar, terutama pada kawasan kota dan pariwisata dikhawatirkan menggusur pola mukiman adati yang ada dan pada akhirnya dapat mengikis habis budaya masyarakatnya. Dari beberapa ungkapan tersebut di atas secara deskriptif menjadi bahan menarik untuk diulas dan diharapkan dapat berguna dalam memperoleh pengetahuan sebagai bahan telaah untuk lebih memantapkan penguasaan nilai-nilai hakikinya di masa mendatang.

FALSAFAH DAN KONSEP BERMUKIM

1. Falsafah

Falsafah hidup masyarakat Bali didasarkan atas agama (Hindu) yang terdiri dari *tattwa*, *susila*, *upacara*. Falsafah (*tattwa*) sebagai lapisan yang paling dalam dari agama Hindu berasal dari kata “*tat*” artinya itu, dan “*twa*” artinya hakekat atau sifat. Kata *tattwa* berarti hakekat atau sifat itu, atau bersifat hakekat (Majelis Pembinaan Lembaga Adat, 1992:25). Pemahaman falsafat (*tattwa*) dilakukan untuk dapat lebih memahami pengetahuan kebenaran yang didalam ilmu pengetahuan disebut filsafat. Filsafat dipelajari dengan kemampuan ratio dan intuisi sampai kebenaran dapat dirasakan. Menurut *tattwa* dalam wujud tunggalnya, Tuhan (*Hyang Widhi*) itu terdiri atas *cetana* (*purusa*) dan *acetana* (*pradana*), yang merupakan benih unsur-unsur kejiwaan dan benih unsur-unsur kebendaan. *Cetana*, dimana benih unsur-unsur kejiwaan yang memberikan kesadaran atau

kekuatan hidup hukum alam beserta isinya, dan *paratma-atma* sebagai sumber hidup. *Acetana*, adalah hukum kodrat yang memberi hidup dan yang menyebabkan segala sesuatu dalam alam semesta menjadi ada dan bergerak. Terwujudnya alam ini adalah hasil bersatunya *cetana* dan *acetana*, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ia langgeng dan abadi.

Dalam Majelis Pembinaan Lembaga Adat (1992:29), secara filosofis, alam semesta ini diciptakan melalui suatu proses yang terdiri dari unsur *panca tan matra*. Unsur-unsur ini muncul dari benih pada materi (*prakerti*), dan *prakerti* itu muncul dari *pradana tattwa* yaitu kekuatan magis dari *Hyang Widhi*. *Panca tan matra* terdiri dari *gandhatanmatra*, *rasatanmatra*, *rupatanmatra*, *sparsatanmatra*, dan *sabdatanmatra*. Kelima unsur tersebut secara evolusi berubah menjadi unsur-unsur benda yang disebut *panca maha bhuta* yang terdiri dari: *pratiwi* (unsur zat padat), *apah* (unsur Zat cair), *teja* (unsur sinar), *bayu* (unsur udara), *akasa* (unsur ether). *Panca maha bhuta* itulah yang menjadi bahan alam, dan juga menjadi bahan jasmani atau badan wadah makhluk hidup

Paparan diatas menggambarkan pemahaman filsafat sebagai pandangan hidup yang memiliki nilai hakiki. Bagi masyarakat Bali (Hindu) cerminan filsafat selalu diusahakan dalam berbhuana termasuk mewujudkannya dalam pola-pola permukiman adati Bali. Pengertian berbhuana tersebut sebagai usaha bagaimana mendudukkan diri manusia (*bhuana alit*) memiliki hubungan harmonis dengan alam (*bhuana agung*).

2. Konsep

Konsep bermukim masyarakat Bali adalah harmoni dan religiusitas, dimana nilai-nilai religius merupakan hal utama. Seluruh emosi keagamaan dalam perilaku kehidupannya diaplikasikan dalam wadah sebagai tempat bermukim. Dengan berpegang pada kepercayaan (*srada*) dan pengorbanan suci (*yadnya*) yang setiap harinya menampakkan kehidupan yang penuh religius. Nilai religius terkandung dalam religi dan simbol, dan hal tersebut dapat dilihat dalam hubungannya dengan manifestasi Tuhan (*Hyang Widhi*) dalam berbagai penjuru alam

yang merupakan simbol religi yang menggambarkan manifestasi Tuhan dalam wujud *bhatara* lengkap dengan atribut serta *saktinya*, senjata, warna, urip serta posisinya di alam semesta menurut arah mata angin.

Simbol ini dalam bermukim merupakan pedoman dalam bersikap dan mewujudkan wadah sebagai tempat bermukim dengan mendudukkan sakral dan profan secara benar. Secara fisik orientasi ke arah sakral dilakukan dari tata cara menyusun pola tata ruang, tata bangunan sampai penggunaan bahan bangunan. Misalnya, arah timur laut (*kaja kangin*) tempat stananya *Bhatara* Sambu dengan *saktinya* Mahadewi, merupakan orientasi yang sakral (*utamaning utama*). Tuhan dalam manifestasinya sebagai *Bhatara Tri Sakti* (Brahma, Wisnu, Siwa) yang bermakna religius menggambarkan manifestasi kekuatan Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, pelebur yang secara fisik manifestasinya di stanakan pada tiga tempat suci dalam wilayah desa berupa Pura Tri Khayangan (Puseh, Desa, Dalem). Dalam pola bermukim, prinsip-prinsip hirarkhi ruang memaknai tempat-tempat yang disucikan (sakral) berlaku menyeluruh. Menurut Alit (2003) dalam menata lingkungan dari unit terkecil (*umah*), perumahan (*pawongan*), tempat bermukim (desa *pakraman*) sampai tingkat regional Bali diatur secara berjenjang yang secara hirarkhis tersusun dalam katagori tiga-tiga bertingkat (*utama, madya, nista*).

3. Harmoni

Berbicara harmoni berarti kita berangkat dari keberagaman yang serbaneka. Sesuatu yang beragam berarti memiliki ciri atau makna tersendiri yang berbeda satu sama lainnya. Bila kita berangkat dari keberagaman untuk berbicara harmoni berarti berbicara keberagaman menunggal yang dalam pemahaman masyarakat Indonesia dikenal dengan “Bhineka Tunggal Ika” Untuk itu, konsep harmoni dapat dicapai dengan penyelarasan yang secara ideal dituangkan dalam wujud penyelarasan antar bagian-bagian yang sama atau serupa. Sebagai contoh bagaimana manusia dengan sesama, alam lingkungan termasuk lingkungan buaatannya bisa mencapai keharmonisan. Dalam hal ini dapat kita lihat usaha penyelarasan diri terhadap

masyarakat. Individu diposisikan sebagai komponen yang hidup, dimana menurut hukum alam hanyalah sebagai objek. Disisi lain, dalam lingkungan hidup sosial, manusia dapat berperan sebagai subyek dan obyek. Statusnya sebagai perorangan selalu dilihat dalam hubungan dengan orang lain. Fungsi dan peranannya diatur menurut pranata sosial untuk memberi arah perilaku kehidupannya termasuk hubungan manusia dengan manusia sekitarnya. Sedangkan dalam hubungannya dengan lingkungan hidup buatan, fungsi utama manusia adalah perencana, perancang, pembangun, pengelola dan penentu keadaan lingkungan hidupnya. Dengan demikian, manusia sebagai individu yang membentuk lingkungan hidup buatan dengan mengubah unsur-unsur lingkungan hidup alam, sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih efisien untuk berbagai keperluan dan kesejahteraan hidupnya.

Harmonisasi dalam model ruang dapat pula berupa penyelarasan antar individu dalam masyarakat yang dilihat dari pengelompokan sosial dalam suatu ruang. Wujud ruang dapat berupa wilayah administratif desa adati dengan batas-batas fisik yang jelas baik berupa sungai, parit, jalan, sawah, tegalan dan sebagainya. Dalam desa adati pengelompokan sosial dapat tercermin pada pengelompokan tempat tinggal dalam bentuk desa, *banjar* atau *tempek*. Dalam tata ruang terdapat dua model pengelompokan ruang sosial yaitu; model pola tercampur dan terpisah (Suryanto,1989:77).

Model ruang tercampur tidak terdapat adanya segregasi sosial dalam lingkungan. Didalam model ini masyarakat terhimpun dalam ruang dengan tidak memandang status sosialnya. Dari aspek fisik model ruang tercampur akan terjadi kebebasan untuk ruang tempat tinggal mereka sesuai dengan keinginannya. Hal tersebut akan berbeda dengan model ruang terpisah dimana kebebasan individu atau keluarga tidak begitu besar karena adanya keterikatan untuk menjaga norma-norma kehidupan yang telah disepakati bersama. Faktor yang berperan pada umumnya adalah pertalian kekeluargaan (*kinship*) seperti terlihat pada kampung-kampung tradisional, dan yang berkaitan dengan pertalian profesi nampak pada kampung-kampung nelayan, perumahan

pegawai, atau perumahan karyawan dari suatu perusahaan atau pada mukiman etnis kampung kota. Dari aspek sosial, pola ini memungkinkan kelompok elite atau klen tertentu menetap secara terpisah, dan memungkinkan terjadi gap sosial atau rasa super dengan kelompok sosial lain. Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam lingkungan hunian khusus bagi anggota keluarga raja (*puri*), perumahan elite, kampung etnis dan sebagainya. Kemungkinan lain dengan pola terpisah sangat menarik bagi kelompok masyarakat yang menghendaki kebebasan atau menginginkan keberadaan rumah tangga yang sangat pribadi (*private*). Umumnya kelompok sosial baru atau penduduk pendatang seperti: seniman, wisatawan atau orang-orang yang ingin lepas dari ikatan-ikatan adat-istiadat menyukai pola seperti ini.

Harmonisasi terkait dengan pranata sosial dapat dilihat adanya pranata sosial terkait dengan desa dinas dan desa adat. Kedua model ini terdapat dikotomi dalam tugas dan tanggung jawab walaupun pelaku utama kemungkinan adalah individu, kelompok orang atau masyarakat yang sama. Dalam kelembagaan ini individu sebagai bagian dari masyarakat diatur dan tidak bisa lepas sehingga menjadi satu kesatuan. Dalam kehidupan yang demikian konsep harmoni dapat diusahakan dan di selaraskan agar antar individu dapat hidup harmoni dan damai dengan saling asih, asah, asuh, *paras-paros*, *salunglung sabyiantaka*, dan saling *wangi mewangikan*.

Harmonisasi dengan alam terkait dengan konsep keseimbangan kosmologi, yang menurut Anh (1984:87), bahwa makrokosmos dan mikrokosmos saling berhubungan secara harmonis, sehingga sesuatu yang tercipta diselaraskan dengan lingkungan. Dalam prinsip keseimbangan kosmologi tersebut terdapat pandangan bahwa kesempurnaan di alam semesta ini merupakan keserasian antara kedua komponen dikotomik. Artinya satu komponen tidak mungkin ada tanpa komponen lain, keduanya merupakan satu kesatuan. Keseimbangan alam terjadi dari nilai kedua komponen berada dalam suatu keadaan yang sama bobotnya atau maknanya. Pandangan yang

demikian ini dalam masyarakat Bali disebut prinsip *rwa bhineda*. Dua yang berbeda bila ditinjau dari filsafat *yin* dan *yang*, dinyatakan bahwa *yang* mewakili langit, siang, matahari, jantan, api, kuat dan lain-lain. *Yin* mewakili yang berlawanan: bumi, malam, bulan, betina, air, pasif, lemah, susah dan lain-lain. Dikotomi tersebut dapat direduksi menjadi prinsip-prinsip manunggal yang universal. Konsep harmoni dalam bermukim dimana lingkungan sosial dan fisik dipertalikan sebagai isi dan wadah, dan menurut Kaler (1979:88) keterjalinan tersebut bagaikan *bhuana alit (manik)* dalam *bhuana agung (cucupu)* di masa embrio. Dengan demikian, dapat dilihat betapa usaha hubungan antara manusia dengan alam beserta isinya diwujudkan dalam kehidupan nyata dengan sempurna, sehingga masyarakat yang bermukim paling serasi dan harmonis di Bali adalah masyarakat yang hidup selaras dengan alam.

POLA MUKIMAN ADATI BALI

Pola mukiman adati Bali didasarkan atas kesamaan dalam pandangan, kepercayaan, adat-istiadat dalam bermukim, yang kesemuanya membentuk tatanan pola adati Bali. Pola mukiman adati Bali secara umum dapat ditinjau dari pola regional, pola desa dan unit-unit huniannya.



Permukiman Desa Tradisional Penglipuran
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2002.

1. Pola Mukiman Regional Bali

Pola mukiman adati secara regional Bali memiliki nilai universal yang membedakan area sakral dan profan, dan dalam wujud fisik terdapat adanya area hulu (*luan*) dan hilir (*teben*). Disamping terdapatnya nilai-nilai

universal, nilai bersifat lokal dan pengaruh geografi ikut memberikan warna tersendiri terhadap pola mukimannya, seperti nampak pada pola desa Bugbug, Tenganan, Pengotan, Trunyan, Jullah atau desa-desa tradisional lainnya.

Ciri khas pola mukiman adati Bali dimana daerah tinggi (gunung, bukit) sebagai area hulu (*luan*), dan area rendah sebagai area hilir (*teben*). Menurut Alit (1996) ciri khas pola tempat tinggal dari unit terkecil sampai pola-pola permukiman skala regional diteladani dari kondisi topografis alam Bali dimana deretan bukit dan gunung yang membelah Bali menjadi bagian Selatan dan Utara ikut membentuk tatanan dan orientasi bagaimana mereka bermukim. Tatanan pola dan orientasi mukiman tradisi dilandasi konsep “*tri hita karana*” yang mendudukkan *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* secara serasi dan harmonis dalam pola mukimannya.

2. Pola Mukiman Desa

Pola desa adati sebagai gambaran umum dapat dilihat pada ciri permukimannya pada daerah pegunungan, dataran dan pantai. Pola desa pegunungan cerminan polanya tampak berkonotasi dualistik (*luan-teben*, *kiwa-tengen*), pada daerah dataran polanya hirarkhi berjenjang (*utama*, *madya*, *nista*), sedang daerah pantai polanya kombinasi. Pada pola mukiman pegunungan faktor geografis memberikan peranan penting dalam pola mukimannya. Tanah desa yang bertopografi bervariasi yang terdiri dari tanah landai, bukit, jurang memberikan pengaruh, sehingga pola mukiman linear diterapkan mengikuti transis seperti di Desa Sembiran. Demikian juga topografi yang memiliki ketinggian (daerah pegunungan) memberikan hawa sejuk dan dingin berpengaruh pula terhadap pola-pola penempatan fungsi ruang dan pola bukaan bangunan. Hal ini dapat dilihat pada desa-desa pegunungan dimana keberadaan dapur menyatu dengan tempat tidur untuk memberikan rasa kehangatan dan kenyamanan.

Pola mukiman pada daerah dataran cenderung mengikuti konsep-konsep arsitektur Bali yang tertuang dalam *hasta kosala kosali*,

dimana pertimbangan hirarkhi ruang (*utama*, *madya*, *nista*) memegang peranan penting. Desa yang terdiri dari unit-unit pekarangan sebagai tempat bermukim dapat berupa *umah*, *jero*, *puri*, *grya*, dan wujud tersebut terkait dengan klen (*soroh*) yang menempatnya. *Puri* sebagai unit kediaman raja, sekaligus sebagai tempat pemerintahan di jaman kerajaan, sehingga *puri* dengan *pempatan agungnya* menduduki tempat yang paling sentral dan sebagai pusat orientasi. Polanya terdiri dari hirarkhi ruang, seperti adanya ruang *bencingah*, *jaba sisi*, *tandeg*, *paruman* sampai pada *jeroan* yang tersusun menurut hirarkhi ruang. Pola *puri* juga erat kaitannya dengan keberadaan unit-unit hunian disekitar *puri*, terutama masyarakat yang menempati tanah milik *puri*, milik adat, milik desa dan sebagainya.

Pola mukiman pantai yang umumnya dihuni oleh para petani dan nelayan, cenderung mengikuti pesisir. Secara umum pola mukimannya tercampur karena terkait dengan keberadaan etnis, dan mata pencaharian pada desa-desa pantai yang beragam seperti mukiman Desa Kedonganan, Benoa, Serangan, Kusamba, Tulamben, Pengastulan, Pengambangan, maupun Cupel, dimana penduduknya tercampur dengan non Hindu. Secara umum pola mukiman mereka diadatkan dengan kaidah-kaidah umum mukiman adati Bali.

3. Pola Unit Hunian



Pola Hunian Tradisional Bali
Sumber: www.kimpraswil.go.id.

Pola unit-unit hunian sebagai tempat tinggal memiliki beberapa massa bangunan yang membentuk *natah*. Cerminan *natah* pada unit-unit hunian ini berupa: *natah sanggah*, *natah umah*, *natah paon*, *natah jineng*, dan *natah lebu*. Setiap *natah* memiliki makna sakral dan

profan sesuai fungsinya. *Natah* sebagai cerminan ruang pengungkapannya terkait dengan kegiatan kehidupan kerumahtanggaan dari kegiatan sakral sampai profan. Ditinjau dari orientasi massa bangunan dalam suatu pekarangan huniannya mengarah ke dalam dan keberadaan tempat suci menempati area utama.

Tata letak tempat suci dalam suatu pekarangan rumah tinggal berada pada daerah tempat yang lebih tinggi (*kaja*) dan timur (*kangin*). Pola perletakan tempat suci masih memilih bagian pada *mandala* yang paling utama. Pergeseran perletakan tempat suci terdapat juga pada desa-desa yang memiliki adat istiadat bersifat lokal seperti Desa Antosari, Sudimara dan Pandak Gede. Pergeseran tersebut dimungkinkan karena orientasi ke arah jalan dan/atau utara, dimaknai memiliki nilai kesucian. Pola-pola desa adati Bali bervariasi, akan tetapi nilai sakral dan profan tetap menjadi bahan pertimbangan dalam meletakkan tempat suci dalam pekarangan rumah tinggal.

MORFOLOGI POLA PERMUKIMAN

1. Morfologi sebagai Proses

Morfologi pola mukiman lebih dilihat dari proses terbentuknya perubahan pola, dimana dapat diibaratkan sebagai morfologi pada untaian kalimat yang didalamnya terkandung kata-kata. Dengan demikian morfologi berangkat dari tipologi yang memiliki kaidah-kaidah atau norma-norma yang membentuknya, dan dilihat pula dari segi faktor yang mempengaruhinya sehingga terjadinya perubahan-perubahan wujud fisik yang ditimbulkannya.

Dalam pola tatanan fisik dan pembangunan terkandung pengertian keterkaitan proses morfologi. Pola tatanan fisik lingkungan komunitas dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang menyangkut fisik, sosial, ekonomi dan budaya. Sedangkan pembangunan menurut Coralie Bryant (dalam Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, 1987:21), diartikan sebagai peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya, yang didalamnya tercakup pengertian “menjadi” (*being*) dan “mengerjakan” (*doing*). Morfologi pola mukiman merupakan kegiatan mengerjakan

sesuatu menjadi ada, baik dalam wujud ruang maupun bangunan dengan berbagai stilistiknya.

Penataan lingkungan menurut Habraken (dalam Budiharjo, 1995:II-3), terdiri dari *spatial system*, *physical system* dan *stylistic system*. *Spatial system* berhubungan dengan tata ruang, pola perletakan massa bangunan dalam tata ruang. *Physical system* meliputi penggunaan sistem konstruksi, dan *stylistic system* merupakan kesatuan yang mewujudkan penampilan bentuk bangunan. Dari uraian tersebut morfologi berarti mewujudkan sesuai dengan kemampuan untuk melakukan pembangunan baru, melakukan penyesuaian-penyesuaian, perubahan-perubahan yang bukan hanya bersifat fisik tetapi juga bersifat nonfisik. Oleh karena itu, morfologi dapat dipandang sebagai suatu proses dalam mencapai pilihan-pilihan tujuan secara prosedural melalui tahapan-tahapan dengan mematuhi berbagai peraturan, perundang-undangan, dan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Dari uraian diatas dapat dikatakan terjadinya morfologi pola mukiman adati Bali dimulai semenjak adanya perkembangan kemampuan, dan keinginan masyarakat untuk merubah diri sebagai pengaruh internal, sedangkan pengaruh eksternal berupa gagasan atau ide, produk, pembangunan yang datang dari luar yang semuanya ikut memberikan andil dalam morfologi.

2. Morfologi Pola Mukiman Desa

Pola mukiman desa dengan berbagai macam tipologinya secara umum menampakkan area *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan* yang secara dikotomi adanya bagian hulu (*luan*) dan hilir (*teben*). Area *pawongan* sebagai area hunian memiliki pola morfologi yang sangat bervariasi. Bentuk morfologinya dipicu oleh perkembangan keberadaan prasarana dan sarana lingkungan. Keberadaan prasarana lingkungan seperti jalan, jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi memberi andil pada morfologinya. Sebagai contoh dari bentuk morfologi area ini adalah: linearitas mengikuti jalan berbentuk pita (*ribbon*). Ketersediaan jaringan listrik maupun air bersih akan memberikan pembangunan pada lahan baru di area *palemahan* diluar area *pawongan*.



Permukiman Desa Tradisional Bayung Gede
Sumber: *Dokumentasi Pribadi, 2003.*

Demikian juga dengan adanya sarana lingkungan tradisi yang bersifat adat ditingkatkan dalam tatanan kehidupan baru yaitu dengan adanya fasilitas lingkungan bersifat dinas, seperti pembangunan sekolah, pasar, perdagangan, perkantoran, bangunan kesehatan, dan keamanan yang memicu terjadi morfologi. Arah morfologi tergantung ketersediaan lahan pada ruang desa, dan makin terbatasnya ruang yang tersedia cenderung mengacaukan pola. Hal ini terjadi karena pembangunan diluar pola adati yang disebabkan oleh kesulitan mendapatkan lahan untuk pembangunan. Disamping itu keterbatasan pemilikan tanah adat yang dapat mendukung keutuhan pola akan menyebabkan pola fisik mukimannya tak mampu bertahan. Bila hal yang demikian terjadi maka dengan adanya berbagai pembangunan fasilitas lingkungan tanpa didukung oleh adat istiadat yang kuat dan melembaga, akan membuat pola yang ada akan mengalami morfologi. Dengan demikian, setiap pengambilan keputusan suatu pembangunan kedinasan maupun adat, agar selalu diadaptasikan secara sempurna. Usaha ini dapat dimulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami makna pembangunan, serta pemerintah sebagai motivator dan inovator berperan aktif dalam mengkomunikasikannya.

3. Morfologi Pola Mukiman Desa-desa Kawasan Wisata

Bali dengan pariwisata budayanya telah mengembangkan beberapa kawasan yang dimulai dari perencanaan yang dibuat oleh Sceto (1969-1972), dan telah memplot areal kawasan Nusa Dua menjadi kawasan perhotelan mewah

yang dikelola BTDC (Bali *Tourism Development Corporation*). Selanjutnya dikembangkan kawasan wisata di Bali yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dati I Bali No: 528, tahun 1993 tentang kawasan Pariwisata, ditetapkan 21 kawasan wisata. Kini kawasan pariwisata telah direvisi menjadi 15 kawasan wisata, dan 6 obyek wisata.

Kawasan-kawasan wisata tersebut terdapat pada daerah pegunungan, dataran dan pantai. Pola desa-desa adati pada kawasan wisata tersebut umumnya dirancang secara kawasan, dan hal ini menjadikan tekanan-tekanan pembangunan yang tidak sama pada setiap desa pada kawasan tersebut, sehingga perkembangannya terkait erat dengan penekanan fungsi ruang kawasan. Penekanan tersebut dalam perkembangannya membawa dampak masing-masing sesuai dengan penekanan fungsi apakah sebagai area perhotelan, pemukiman, industri rumah tangga, perdagangan, fasilitas pariwisata, preservasi, dan konservasi. Setiap penekanan fungsi mengalami perkembangan yang bermula dari kebutuhan akan hunian yang makin membesar sehingga berdampak pada pola permukiman karena memerlukan lokasi baru dengan lahan yang memadai.

Disisi lain, pariwisata yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat berupa rumah-rumah dengan pola tradisional telah berubah karena dampak beragamnya mata pencaharian, kemampuan ekonomi dan lain sebagainya seperti mengubah hunian adati menjadi wajah baru berupa pertokoan, bar, restoran, *artshop*, *klub*, *maney changer* dan sebagainya, sehingga terjadi morfologi yang merubah pola-pola adati yang telah mereka miliki. Demikian juga fasilitas lingkungan berupa tempat suci (*pura*) dilengkapi dengan panggung (*stage*) untuk tempat pertunjukan bagi wisatawan, termasuk *bale banjar* yang difungsikan komersial untuk bar, restaurant, *art shop* sehingga terjadi duplikasi fungsi.

Selanjutnya, dengan pesatnya pembangunan hotel yang menggunakan tanah *palemahan* desa, akan menambah cepatnya terjadi morfologi apalagi diikuti dengan pembangunan fasilitas ikutannya, seperti : galeri, museum, gedung konser, klub-klub, dan

sebagainya. Peningkatan jumlah hotel dan fasilitas ikutannya memberikan daya tarik bagi para pencari kerja datang ke kawasan tersebut, dan konsekuensinya dari peningkatan jumlah pencari kerja terjadi peningkatan kebutuhan akan hunian, sehingga terjadi pembangunan perumahan, real estate, kontrak rumah, maupun sewa lahan.

Perkembangan kebutuhan hunian ditambah dengan keberagaman sosial budaya penghuni, mewujudkan hunian yang makin beragam sesuai dengan budayanya masing-masing sehingga terjadi morfologi yang beragam. Bila terjadi perubahan hunian dengan prototipenya yang mereka terima, maka pembangunan dengan biaya tinggi yang telah ditanamkan menjadi mubasir karena terjadinya perubahan pada setiap unit rumah termasuk nuansa yang ditampilkan makin menjauhi pola-pola hunian adati Bali.

Bagi pembangunan kawasan wisata yang berlokasi di pantai, tampak berlomba menguasai pantai yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum (*public beach*), malahan masyarakat sebagai pengguna mulai terpinggirkan. Masyarakat akan lebih menderita lagi bila dikuasainya tempat-tempat umum yang disucikan untuk kegiatan ritual (*melasti*), atau menjadikan tempat suci (*pura*) yang berada di sekitar atau dikungkung dalam *site planing* perhotelan, dimanfaatkan sebagai estetika elemen yang penuh dengan kegiatan ritual yang pelaksanaannya diharuskan mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak hotel. Apabila hal yang demikian terjadi, maka terdapat berbagai kesenjangan dan morfologinya mengarah pada degradasi atau hancurnya pola-pola adati yang telah ada. Hal ini perlu kontrol yang ketat dari masyarakat adat maupun dinas untuk menghindari terjadinya pembangunan "free for all land use" yang memicu terjadinya morfologi yang melenyapkan nilai-nilai tipologi desa-desa adati. Untuk itu diperlukan pembangunan yang dapat diterima oleh semua pihak baik masyarakat, swasta dan pemerintah.

4. Morfologi Pola Mukiman Urban

Struktur kota di Bali berawal dari desa-desa adati dengan *puri* sebagai sentralnya yang dikelilingi secara belapis oleh hunian (*jero*) dan

hunian masyarakat sekitarnya. Pasar dan *pempatan agung* (*cross road*) yang berada pada daerah sentral sebagai *land mark* kini sudah mengalami perubahan. Umumnya pola mukiman desa adati di daerah perkotaan Bali telah kehilangan *pempatan agung*, orientasi ke arah *puri*, dan bahkan terjadinya pergeseran fungsi area *palemahan* menjadi *pawongan*. Dengan demikian morfologi sudah mengarah ke berbagai arah.

Di sisi lain morfologi terjadi pada ruang terbuka dan bangunan yang berfungsi tertentu. Ruang terbuka yang berupa alun-alun berubah menjadi perdagangan dan pertokoan, *karang tuang* terkubur, *palemahan* desa adati menjadi daerah terbangun. Berbagai permasalahan baru muncul diantaranya lahan menjadi barang yang berharga sehingga *supply* dan *demand* sering tidak seimbang. Kedudukan, peran dan fungsi dari *pura subak*, *ulun suwi*, *bale timbang*, *karang tuang*, *campuhan* dan sebagainya yang ada di daerah perkotaan makin tidak menentu karena kurang jelasnya pengalihan fungsi. Ruang terbuka berupa alun-alun ditukar guling untuk pembangunan pertokoan sebagai identitas kota, kemudian *telajakan* sungai dirambah untuk direklamasi dan dibangun sehingga lingkungan menjadi kumuh. Perkembangan terjadi alamiah kesegala arah, dan dalam lahan sempit yang memicu pola desa dan unit-unit hunian berubah. Perubahan tidak hanya bersifat horisontal tetapi terjadi pula ke arah vertikal.

Jaringan transportasi kota yang berkembang secara alamiah dan/atau dibuat berdasarkan perencanaan kota dengan jalan lingkarannya ikut memicu perkembangan kota secara alamiah. *Land Consolidation* (LC) memberikan bentuk morfologi ke arah *grid*. *Real estate* memberikan perkembangan yang menyebar (*spread*), dan jalan lingkar (*ring road*) dapat memilah-milah keutuhan desa adati menjadi bagian yang berkeping-keping. Sementara masyarakatnya kebingungan mencari *pempatan agung* yang kini dilengkapi dengan lampu pengatur lalu lintas (*traffic light*) dengan patung-patung sebagai elemen pengarah. Pergerakan kendaraan buatan Eropa, Jepang, Korea, berbaur dengan sepeda gayung dan kereta kuda (*dokar*), sehingga terjadi transportasi skala cepat dan lambat berbaur menjadi satu.

Morfologi seperti diuraikan di atas, dipicu oleh: (1) perkembangan penduduk kota yang terus meningkat; (2) terbatas atau relatif tetapnya luas desa adat; (3) meluasnya area urban kesegala arah; (4) dibangunnya bangunan kegiatan pemerintahan dan perdagangan, industri serta jaringan transportasi. Hal-hal ini menyebabkan hampir seluruh pola desa-desa adati di kota mengalami perubahan wajah dan karakter. Dalam hal ini perlu dilakukan gebrakan pemerintah bersama masyarakat dalam mewujudkan kota budaya.

5. Morfologi Pola Unit Hunian

Morfologi unit hunian kota nampak jelas dilihat dari pola perletakan massa bangunan, orientasi dan luasan kepemilikan lahan. Dalam pola perletakan massa bangunan usaha penerapan konsep *sanga mandala* telah mengalami perubahan disebabkan oleh adanya tuntutan kebutuhan yang bersifat ekonomi. Hal ini terutama terlihat pada zone utama yang letaknya di pinggir jalan, yang sebenarnya merupakan zone bersifat suci diubah menjadi garase, toko, warung dan sebagainya. Usaha mempertahankan jumlah massa bangunan dalam membuat *natah* masih nampak terutama pada pekarangan yang luas dan massa bangunan berkisar lebih dari 3 (tiga) massa bangunan. Usaha membentuk *natah* umumnya disebabkan sebagai akibat idealisme terutama yang terkait dengan tata cara dan upacara yang terkait dengan adat-istiadat dan keagamaan.

Morfologi juga diakibatkan beberapa fungsi dalam bangunan tradisional Bali telah mengalami perubahan. Perubahan ini disebabkan karena kebutuhan ruang dan adanya peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan fungsi baru sebagai tanggapan aktif masyarakat terhadap meningkatkan kebutuhan ekonomi dan akomodasi. Morfologi ini umumnya dimulai dari bangunan dapur, dimana terdapat fungsi gabungan dalam suatu wujud bangunan, selanjutnya terjadi morfologi secara berturut-turut pada *bale dauh* dan *bale delod* yang sangat terkait dengan posisi jalan. Morfologi massa bangunan dapur (*paon*) sebagai salah satu massa bangunan pada umumnya telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut sebagai akibat perkembangan fungsi, dimana dapur tidak

terbatas hanya untuk memasak saja, akan tetapi berfungsi juga sebagai gudang, garase, toko, warung. Demikian juga ruang tidur mengalami perubahan dengan adanya perkembangan fungsi baru seperti ruang tamu, ruang kerja, toilet dan sebagainya. Hal tersebut dipengaruhi oleh fungsi-fungsi baru dan praktis. Perubahan terjadi karena kecenderungan kebutuhan fungsi baru yang memerlukan penambahan ruang dalam keadaan site yang terbatas.

Perubahan seperti yang disebutkan di atas umumnya terjadi pada massa bangunan yang bersifat profan. Sedangkan untuk bersifat sakral seperti tempat suci, dan *bale dangin* perletakannya masih selalu diusahakan tetap seperti sebelumnya. Hal ini karena nilai sakral dan nilai profan sangat erat kaitannya dengan nilai kepercayaan dan keagamaan (Hindu). Tempat sembahyang selalu diletakkan pada daerah hulu (*kaja kangin, kaja, atau kangin*), dan ada yang dipindah ke lantai atas untuk bangunan yang bertingkat, karena menurut kepercayaan masyarakat tempat suci sebaiknya berada pada bagian yang paling utama (*kaja kangin*, atau di tempat yang tinggi). Unit bangunan yang paling banyak dihilangkan pada daerah kota bila dibandingkan dengan bangunan lain adalah lumbung. Hal ini sebagai akibat pergeseran mata pencaharian yang agraris bergerak ke arah industri, perdagangan dan jasa, dan kemudian diikuti dengan pola manajemen pemerintah dalam penyediaan beras lewat dolog. Peralihan fungsi mata pencaharian dari pertanian sawah, tegalan, kebun menjadi pegawai, pengerajin, pedagang ikut mendorong hilangnya bangunan lumbung. Jadi lumbung tidak lagi menjadi kelengkapan penting dalam suatu kompleks rumah tinggal, yang sebelumnya merupakan suatu syarat dalam masyarakat agraris dalam kaitannya dengan menyimpan padi.

Morfologi juga terkait dengan pemilihan luas lahan dan luas pekarangan. Hal ini tampak berpengaruh nyata terhadap pola perletakan massa bangunan. Pada luas lahan yang sempit, jumlah massa bangunan cenderung makin sedikit, dimana terdapat penggabungan beberapa fungsi dalam satu massa bangunan sehingga komposisi massa bangunan tidak selalu ditata menurut *asta bumi* yang memperhitungkan nilai sakral dan profan. Hal yang demikian dapat

dipahami bahwa morfologi bangunan yang bersifat sakral dan berkaitan dengan nilai religi lebih lambat berubah dari pada yang bersifat profan. Hal tersebut menunjukkan terjadi morfologi wujud fisik lebih awal dan lebih besar bila dibanding dari wujud gagasan (idealisme) yang berlandaskan filosofi keagamaan (Hindu).

Status pemilikan lahan (tanah hak milik, tanah adat, tanah desa, tanah negara dan bentuk-bentuk status tanah lainnya) dan luas pekarangan rumah tinggal di kota, banyak memberikan pengaruh terhadap pola. Dilihat dari morfologinya, pola-pola mukiman yang didasari atas pemilikan lahan yang lebih luas umumnya mengalami morfologi lebih lamban dibanding dengan pemilikan lahan yang sempit. Sementara itu daerah yang makin dekat dengan areal hunian padat, menunjukkan pemilikan persil makin kecil, dan makin menjauhi hunian padat pemilikan persil pekarangan rumah tinggal makin luas. Pemilikan lahan yang luas di daerah urban cenderung disewakan atau dikontrakkan, hal ini memicu perubahan pola dan menyumbang kekumuhan sehingga lingkungan menjadi berkualitas rendah.

Morfologi pola dan orientasi massa bangunan dalam arsitektur rumah tinggal di daerah kota telah berkembang cepat, namun usaha orientasi mengarah ke dalam (*natah*) masih selalu diusahakan karena masih berfungsi untuk menunjang kegiatan upacara (*yadnya*) walaupun sudah mengalami penurunan.

Orientasi ke dalam pada unit hunian di perkotaan umumnya pada rumah-rumah tradisional yang tetap mempertahankan pola tradisinya. Disisi lain terdapat unit hunian yang memiliki kombinasi orientasi ke dalam dan ke luar terutama bagi rumah tinggal yang memiliki lebih dari 1 massa bangunan. Sedangkan yang berorientasi ke luar hampir seluruhnya bangunan rumah tinggal pada luasan persil yang kurang dari 200 m² dengan massa bangunan tunggal. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa penggunaan konsep *sanga mandala* pada rumah tinggal akan sulit diterapkan pada lahan sempit dengan massa bangunan tunggal.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Ditinjau dari posisi pola mukiman secara umum, mukiman yang mengalami perubahan kecil adalah di daerah perdesaan terutama pada desa-desa tradisional. Hal ini karena adanya pandangan masyarakat tentang nilai sakral dan profan, dimana makin ke arah hulu (*luan*) memiliki nilai utama yang selalu diusahakan dan dipertahankan.
- b. Morfologi desa-desa adati di daerah perdesaan dipicu dengan adanya sarana dan prasarana lingkungan yang memberikan arah morfologi cenderung mengikuti keberadaan prasarana, sehingga menimbulkan morfologi bersifat menyebar atau mengikuti jalan (*ribbon*). Disamping itu terdapat usaha mengadatasikan dengan duplikasi fungsi, dan bila tidak memungkinkan akan mencari lokasi yang cenderung tidak mengikuti pola-pola permukiman adati Bali.
- c. Morfologi pola-pola permukiman adati pada daerah urban cenderung melenyapkan pola-pola tradisinya yang telah ada. Morfologi yang terjadi pada unit-unit hunian cenderung mengalami perubahan pada orientasi masa bangunan sebagai akibat kebutuhan baru dan keterbatasan lahan. Kendatipun demikian orientasi *luan* dan *teben* masih merupakan pilihan-pilihan yang selalu diusahakan.
- d. Pada daerah urban seringkali muncul lingkungan kumuh (*slum area*) sebagai akibat pembangunan pada lahan kontrakan atau lahan ilegal seperti bantaran sungai, maupun pembangunan yang menyerobot tanah milik negara sehingga terjadi morfologi yang tak sesuai dengan norma-norma permukiman adati Bali.

2. Saran

- a. Dalam menyikapi suatu morfologi pola permukiman adati di perdesaan atau perkotaan harus memperhatikan sistem budaya masyarakat bersangkutan. Dalam penyediaan sarana dan prasarana lingkungan perlu diadaptasi kepercayaan dan adat

- istiadat masyarakat setempat agar dapat mewakili keinginan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pola mukimannya.
- b. Pengembangan suatu kawasan yang meliputi beberapa desa hendaknya tetap meningkatkan kualitas desa adati masing-masing desa yang ada.
 - c. Untuk desa adati di daerah urban, pengembangan kawasannya harus tetap memperhatikan titik-titik penting seperti pura, tempat-tempat yang disucikan dan, tempat yang memiliki nilai religius sebagai aura religiusitas desa.
 - d. Pada unit-unit hunian agar dibuatkan standarisasi pemilikan lahan dengan berbagai katagorisasi untuk menghindari terjadinya morfologi yang jauh dari nilai adati hunian Bali.
 - e. Untuk menggeneralisir morfologi perubahan pola mukiman perlu diadakan penelitian di berbagai tempat dengan berbagai ciri kehidupan masyarakatnya seperti petani, nelayan, pariwisata, kota, desa dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alit, I Ketut. 1996. *Deskrepansi Pola Pembangunan Fasilitas Lingkungan secara Adat dan Dinas dalam Penataan Ruang Desa-desa Wisata di Bali (Studi Kasus, Kelurahan Ubud)*. Bandung: Tesis Program Pasca Sarjana Magister Arsitektur, Institut Teknologi Bandung.
- Anh, T.T. 1984. *Nilai Budaya Timur dan Barat*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Arief Budiman & Ph. Quarles van Ufford, 1988, *Krisis Tersembunyi dalam Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Bagus, I G.N. 1980. *Kebudayaan Bali*. Jakarta: Djambatan.
- Bryant, Coralie dan Louise G. White. 1989. *Managemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Penerjemah: Rusyanto L Simatupang, pengantar Indonesia: Dorodjatun K. Jakti, Gelora Aksara Pratama.
- Budihardjo, E. 1983. *Menuju Arsitektur Indonesia*. Bandung :Alumni, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Permukiman sebagai Kesatuan Ekosistem Daerah Bali*. Denpasar: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Kaler, I G. K.. 1983. *Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali*. Denpasar: Bali Agung.
- Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Majelis Pembina Adat Daerah Tingkat I Bali, 1991/1992. *Desa Adat dan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Denpasar: Proyek Pemantapan Lembaga Adat.
- Parimin, A.P., 1986. *Fundamental Study on Spatial Formation Sacred-Profane Concept in Bali*. Disertasi pada Universitas Osaka, Japan.
- Parisada Hindu Dharma Pusat. 1968. *Upadeca*, Denpasar.
- Pitana, I Gede. editor 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Percetakan Offset BP.
- Sneyder, J.C. dan A.J. Catanese. 1985. *Pengantar Arsitektur*. Jakarta: Erlangga.
- Soemarwoto, O. 1985. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan.
- Sukadana, A. A. 1983. *Antropo-Ekologi*. Surabaya: Airlangga University Press,.
- Suryanto. 1983. *Model Neighbourhood Unit sebagai Pendukung Proses Pengembangan Komunitas. Program Perencanaan Wilayah dan Kota*. Bandung: Propgram Pasca Sarjana, Institut Teknologi Bandung.